

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Fadel Pramdana Hasanuddin

NPP. 27.1973

Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: fpramdana@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The contribution of Regional Original Revenue (PAD), transfer funds, and other legitimate income Tarakan City experienced a significant increase in the 2017 to 2020 fiscal year, especially in Regional Original Revenue (PAD) but the revenue generated is still minimal, indicating that the source of Funding from the City of Tarakan still requires the ability to meet the needs of the government affairs of the City of Tarakan so that it still requires financial assistance from the center in addition to regional revenues. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the participation in regional financial independence of Tarakan City, North Kalimantan Province. **Methods:** The research method and approach that will be used in this research is descriptive research method with a qualitative research approach. This study uses the theory of financial ratio analysis by Mahmudi (2019:140-141) which consists of the ratio of the effectiveness of the management of Regional Original Income (PAD), the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, and the ratio of regional financial independence. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the ratio analysis of the effectiveness of the management of Regional Original Revenue (PAD) is 89.09% in the effective category, the ratio analysis of the degree of fiscal decentralization is 9.11% in the very poor category, the analysis of the regional financial dependence ratio is 88.05% in the category very high, and the regional financial independence ratio analysis is 11.66% in the Very Low category. From the results of this study, Tarakan City is classified as still low in supporting the implementation of regional autonomy, although it has increased every year. **Conclusion:** The author concludes that the results of the Regional Original Income Analysis (PAD) in increasing regional financial independence during the COVID-19 pandemic by the Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency (BPKPAD) of Tarakan City have increased every year from 2017 to 2020 however, there were some obstacles found in this study. Based on the inhibiting factors, it was found that there were 3 obstacles, namely the weak degree of decentralization, high dependence on regional finance and low regional financial independence.

Keywords: Regional Original Income (PAD), Transfer Funds, Financial Ratio Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah Kota Tarakan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun

anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2020 terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun pendapatan yang dihasilkan masih minim sehingga menandakan bahwa sumber pendanaan dari Kota Tarakan masih dibutuhkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan Kota Tarakan sehingga masih memerlukan bantuan dana dari pusat sebagai tambahan penerimaan daerah. **Tujuan** : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi dalam kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. **Metode**: Metode dan pendekatan penelitian yang akan dipergunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi (2019:140-141) yang terdiri rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 89,09% dalam kategori efektif, analisis rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 9,11% dalam kategori sangat kurang, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 88,05% dalam kategori sangat tinggi, dan analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 11,66% dalam kategori Rendah Sekali. Dari hasil penelitian ini, di Kota Tarakan tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan. **Kesimpulan** : Penulis menyimpulkan bahwa hasil Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada saat pandemi COVID-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 namun ada beberapa hambatan yang ditemukan pada penelitian ini. Berdasarkan faktor penghambat yang ditemukan ada 3 hambatan yaitu lemahnya derajat desentralisasi, tingginya ketergantungan keuangan daerah dan rendahnya kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Analisis Rasio Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom, pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi dalam memenuhi kebutuhan di lingkungan masyarakat suatu daerah dengan tujuan peningkatan pembangunan di suatu daerah masing-masing. Pembentukan daerah otonom dan desentralisasi sebagian kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengelola dan mengatur sebagian kekuasaan dan kewenangan yang ada. Sumber pendapatan daerah dibagi beberapa macam yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Yuliani (2019:64) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang diambil berdasarkan pada Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berguna untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya”. berkaitan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah laba perusahaan daerah dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Menurut Firdausy (2017:9) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah”. berdasarkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bahwa

merupakan kategori dalam pendapatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah.

Berkaitan untuk keuangan daerah dimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi segala hak dan kewajiban daerah sebagai bagian dari rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan dengan nilai uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dianggap sebagai milik daerah dengan memperhatikan hak dan kewajiban daerah masing-masing. Pengelolaan keuangan daerah ini berkaitan dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan tingkat pendapatan nominal daerah. Berkaitan dengan mewujudkan pelayanan untuk masyarakat serta tercapainya tujuan negara bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi antara lain otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat maka meningkatnya tuntutan masyarakat dengan tujuan pemerintahan yang baik. Sehingga terciptanya pemerintah untuk lebih efisien dan efektif dalam bekerja khususnya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah harus memastikan mendapat dukungan dari sumber penerimaan yang merupakan berasal dari dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Lain yang Sah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan faktor yang sering menjadi penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah sistem hukum dan administrasi pendapatan yang lemah di setiap daerah, kurangnya untuk menemukan keunggulan dan potensi daerahnya, tidaknya optimis dalam suatu pencapaian, kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang sangat kurang, kurangnya pada kesadaran wajib pajak/retribusi dan terakhir sering kali pengeluaran suatu biaya yang digunakan untuk melaksanakan program dinaikkan sejak awal penganggaran. Berkaitan dengan faktor-faktor tersebut maka terjadinya tidak efektif dalam penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berdampak buruk pada daerah tersebut. Setiap daerah bahwa dituntut untuk mampu mengupayakan agar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencukupi untuk penyelenggaraan pemerintahannya sehingga akan mudah dalam melaksanakan urusan rumah tangganya dan menciptakan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Adapun masalah yang dihadapi, pemerintah daerah yang terkena dampak serius karena adanya keadaan darurat dapat dilihat dari segi pengelolaan keuangan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi penurunan sangat signifikan pada beberapa waktu ini. Berkaitan hal ini dikarenakan terjadinya pandemi virus *COVID -19* yang biasanya dikenal dengan virus *CORONA*. Virus tersebut sangat berdampak buruk pada perekonomian nasional sehingga virus tersebut berdampak pada perekonomian negara khususnya pada keuangan daerah dengan akibatnya dari pengurangan kegiatan masyarakat dan perekonomian cenderung penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait komitmen mengenai pencegahan atau penanganannya dalam tersebarnya virus *CORONA*.

Wilayah kota Tarakan merupakan daerah yang salah satu daerah otonomnya mengalami kemajuan yang begitu pesat sehingga pemerintah membutuhkan modal yang besar untuk membiayai

penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Hal tersebut menjadikan terhambatnya pengurangan pendapatan pajak dan retribusi yang disebabkan keberadaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah serta pengelolaan dan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terhambat oleh keberadaan masyarakat sebagai wajib pajak dimana tidak tertib melakukan pembayaran pajak dan kurangnya pada fasilitas atau sarana prasarana yang menunjang pengelolaan pajak dan retribusi itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut dalam pertumbuhan bahwa memberikan efek pada pertumbuhan pembangunan yang dapat menunjang efektif dan efisiennya kegiatan perekonomian kota Tarakan. Bertumbuhnya ekonomi akan memberikan kemampuan pada masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya bahwa pada Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) harus melakukan pengawasan terhadap proses penanganan bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerahnya masing-masing.

Berdasarkan tersebut bisa dilihat pada **Tabel 1** bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2017	67.092.417.030	782.139.143.811	8,57
2018	72.401.576.596	880.654.610.999	8,22
2019	73.230.451.032	763.693.529.822	9,58
2020	107.850.263.520	990.158.020.064	10,89

Sumber : LRA APBD Tahun Anggaran 2017-2020

Adapun hal tersebut menandakan bahwa sumber pendanaan dari Kota Tarakan masih dibutuhkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan Kota Tarakan sehingga masih memerlukan bantuan dana dari pusat sebagai tambahan penerimaan daerah sehingga dapat menutupi kekurangan dana tersebut. Pada dasarnya Kota Tarakan harus meningkatkan potensi untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Manasep Orocomna, Bonifasia Elitha Bharanti, dan Paulus K. Allo Layuk (2016) dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015 yang ditulis oleh

Manasep Orocomna, Bonifasia Elitha Bharanti, dan Paulus K. Allo Layuk pada tahun 2016 dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam proses penyusunan penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasarnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni masih sangat kurang. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah belum bisa diandalkan bagi daerah dikarenakan rendahnya sumber pendapatan dari retribusi dan pajak. Penelitian Dwi Purnamasari dan Isna Rodiyah (2019) dengan judul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014 yang ditulis oleh Dwi Purnamasari dan Isna Rodiyah pada tahun 2019 dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Dalam proses penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (campuran) sebagai dasarnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil dari rasio kemandirian yang telah dihitung menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki status kemandirian yang rendah atau berada pada pola hubungan konsultatif. Kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo masih terbilang rendah atau kurang. Kurangnya komitmen pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap besaran peningkatan kemandirian keuangan daerah. Penelitian Krest D Tolosang (2018) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohonyang ditulis oleh Krest D Tolosang pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif sebagai dasar dalam penyusunannya. Sumber data yang diambil hanya melalui data sekunder yakni data/dokumen terdahulu yang sudah ada diambil dari Bagian Keuangan Sekretariat Kota Tomohon dan Badan Pusat Statistik Kota Tomohon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan antara penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitian dan lokus. Berkaitan dengan penelitian ini mengambil judul sesuai dengan peneliti tetapkan yaitu Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Saat Pandemi COVID-19 Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya hanya melakukan pengukuran dan menganalisis menggunakan rasio kemandirian saja. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 jenis analisis rasio dalam pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah. Perbandingan yang lainnya adalah teknik pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan beberapa sampel dan wawancara, sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif saja yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data melalui wawancara terhadap pihak terkait. Dan perbedaan terakhir adalah pada penelitian tersebut metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan menggunakan variabel yang cukup rumit, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasar dalam penyusunannya dengan menggunakan 4 analisis rasio dalam pengukurannya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada saat pandemi COVID-19 di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan penelitian yang akan dipergunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan, sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), kepala bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), kepala subbagian perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), dan kepala bidang akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD). Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan wawancara terhadap 5 orang informan dan dokumentasi dari arsip Laporan Rencana Anggaran yang dibutuhkan. Adapun analisisnya menggunakan teori analisis rasio keuangan yang digagas oleh Mahmudi (2019:140-141) yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan terdapat empat tahap, yaitu efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Tarakan dengan menggunakan pendapat dari Mahmudi yang menyatakan bahwa untuk mengetahui besar tingkat kemampuan keuangan daerah ditentukan dengan empat analisis rasio, yaitu efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin baik. Tingkat efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka untuk menghitung Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut perhitungan dan grafik

rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan tahun anggaran 2017 sampai 2020:

$$2017 = \frac{67.092.417.030}{124.000.000.000} \times 100\% = 54,11\%$$

$$2018 = \frac{72.401.576.596}{134.000.000.000} \times 100\% = 54,03\%$$

$$2019 = \frac{73.230.451.032}{75.434.228.000} \times 100\% = 97,08\%$$

$$2020 = \frac{107.850.263.520}{71.344.205.033} \times 100\% = 151,17\%$$

Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan bahwa penulis menentukan efektivitas terhadap perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diselenggarakan. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan dapat dilihat pada **Tabel 2** perkembangan penerimaan daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan Tahun 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	124.000.000.000	67.092.417.030	54
2018	134.000.000.000	72.401.576.597	54
2019	75.434.228.000	73.230.451.032	97
2020	71.344.205.033	107.850.263.520	151

Sumber : LRA APBD Kota Tarakan Tahun 2017-2019

Berdasarkan **Tabel 2** di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan mengalami kenaikan pada tiap tahun anggarannya. Pada tahun anggaran 2020 persentase realisasinya paling tinggi dari 3 tahun sebelumnya yaitu 151%.

3.2. Derajat Desentralisasi

Berkaitan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh Kota Tarakan dapat diketahui derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai membiayai otonomi daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (TPD). Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut maka diketahui bahwa derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kota Tarakan. Berikut perhitungan dan grafik rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Tarakan :

$$2017 = \frac{67.092.417.030}{774.265.955.603} \times 100\% = 8,66\%$$

$$2018 = \frac{72.401.576.596}{885.538.700.521} \times 100\% = 8,17\%$$

$$2019 = \frac{73.230.451.032}{920.721.653.011} \times 100\% = 7,95\%$$

$$2020 = \frac{107.850.263.520}{924.448.557.055} \times 100\% = 11,66\%$$

Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan bahwa penulis menentukan derajat besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total yang di dapat dari penerimaan daerah. Adanya indikator ini bahwa dapat diharapkan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Perkembangan derajat desentralisasi Kota Tarakan dapat dilihat pada **Tabel 3** berdasarkan perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total yang di dapat dari penerimaan daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Tarakan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)
2017	67.092.417.030	774.265.955.603	8,66
2018	72.401.576.596	885.538.700.521	8,17
2019	73.230.451.032	920.721.653.011	7,95
2020	107.850.263.520	924.448.557.055	11,66

Sumber : LRA APBD Kota Tarakan Tahun 2017-2019

3.3. Ketergantungan Keuangan daerah

Berkaitan dengan derajat ketergantungan keuangan daerah melalui perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah. Pada dasarnya tujuan dari perhitungan dalam rasio ini sama dengan rasio kemandirian keuangan, yaitu untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer. Namun ada sedikit perbedaan yaitu dari segi cara penghitungannya, dimana cara penghitungan rasio ketergantungan keuangan daerah ini adalah kebalikkan dari cara penghitungan dari rasio kemandirian keuangan daerah, dan terdapat sedikit perbedaan dalam hal komponen yang diukur. Pengukuran ini bisa memperkuat hasil penghitungan kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau

provinsi, dan begitu juga sebaliknya. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat bahwa untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan. Disinilah letak perbedaan rasio ini dengan rasio kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan lebih menekankan pada Pendapatan Asli Daerah, sementara rasio ini menggunakan total pendapatan. Berikut perhitungan dan grafik rasio ketergantungan daerah Kota Tarakan:

$$2017 = \frac{680.569.918.572}{774.265.955.603} \times 100\% = 87,89\%$$

$$2018 = \frac{780.850.352.513}{885.538.700.521} \times 100\% = 88,17\%$$

$$2019 = \frac{847.491.201.978}{920.721.653.011} \times 100\% = 92,04\%$$

$$2020 = \frac{777.817.861.475}{924.448.557.055} \times 100\% = 84,13\%$$

Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan bahwa penulis menentukan seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap penerimaan dana transfer dari pusat. Adanya indikator ini bahwa dapat diharapkan meminimalisir dalam ketergantungan pada penerimaan dana transfer dari pusat.

Perkembangan ketergantungan keuangan daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada **Tabel 4** berdasarkan perkembangan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total yang di dapat dari penerimaan daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4

Perkembangan Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Tarakan

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)
2017	680.569.918.572	774.265.955.603	87,89
2018	780.850.352.513	885.538.700.521	88,17
2019	847.491.201.978	920.721.653.011	92,04
2020	777.817.861.475	924.448.557.055	84,13

Sumber : LRA APBD Kota Tarakan Tahun 2017-2019

3.4. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan tersebut ditentukan oleh besar kecilnya rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pihak eksternal. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah jadi itu menunjukkan semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pihak eksternal pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai patokan dari kemandirian keuangan daerah tersebut. dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah akan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah juga. Berikut perhitungan dan grafik rasio kemandirian keuangan Kota Tarakan tahun anggaran 2017-2020:

$$2017 = \frac{67.092.417.030}{585.786.873.282} \times 100\% = 11,45\%$$

$$2018 = \frac{72.401.576.596}{721.237.211.961} \times 100\% = 10,03\%$$

$$2019 = \frac{73.230.451.032}{762.714.696.575} \times 100\% = 9,60\%$$

$$2020 = \frac{107.850.263.520}{691.910.393.097} \times 100\% = 15,58\%$$

Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan bahwa penulis menentukan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun indikator ini bahwa dapat diharapkan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Perkembangan kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada **Tabel 5** berdasarkan perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total yang di dapat dari penerimaan transfer Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5

Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan Transfer Kota Tarakan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Persentase (%)
2017	67.092.417.030	680.569.918.572	11,44
2018	72.401.576.596	780.850.352.513	10,03

2019	73.230.451.032	847.491.201.978	9,60
2020	107.850.263.520	777.817.861.475	15,58

Sumber : LRA APBD Kota Tarakan Tahun 2017-2019

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif, karena berada dalam kategori 54,03% - 151,17%. Maka dengan presentase rata-rata 89,09%, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan dinyatakan efektif dan efisien serta efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat pada tiap tahun anggarannya.

Berdasarkan rasio derajat desentralisasi Kota Tarakan mengalami kenaikan selama tahun anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2020. Hasil perhitungan derajat desentralisasi Kota Tarakan dengan rata-rata 9,11%, jika dilihat dalam skala interval berada pada skala 00-10. Dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi Kota Tarakan tahun anggaran 2017-2020 masih berada pada kriteria sangat kurang. Dengan keadaan demikian, dapat dikatakan bahwa Kota Tarakan masih lemah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta masih memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam pembiayaan urusan tersebut.

Berdasarkan rasio derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Tarakan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2020. Hasil perhitungan derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Tarakan rata-rata sebesar 88,05%, jika diukur dengan skala presentase derajat ketergantungan keuangan daerah berada pada skala >50%. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Tarakan berada pada kriteria ketergantungan sangat tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keuangan daerah Kota Tarakan masih bergantung pada pendapatan transfer.

Berdasarkan persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan cenderung penurunan pada tiap tahun anggarannya. Peningkatan hanya terjadi pada tahun anggaran 2020. Hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan rata-rata 11,66%, jika diukur dengan skala interval maka masih berada pada interval 0 – 25. Sehingga dapat diartikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan masih berada pada skala interval yang sangat rendah. Hal ini mengartikan bahwa peran pemerintah pusat masih mendominasi dalam memenuhi belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim sehingga tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih sangat rendah.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pada kemandirian keuangan daerah di Kota Tarakan yakni lemahnya derajat desentralisasi, tingginya ketergantungan keuangan daerah dan rendahnya kemandirian keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa hasil Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada saat pandemi COVID-19 oleh Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 namun ada beberapa hambatan yang ditemukan pada penelitian ini. Berdasarkan faktor penghambat yang ditemukan ada 3 hambatan yaitu lemahnya derajat desentralisasi, tingginya ketergantungan keuangan daerah dan rendahnya kemandirian keuangan daerah. Berkaitan dengan penghambat tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan terdiri dari 3 upaya yaitu upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan cara memperhatikan dan meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan sarana infrastruktur guna memperlancar roda perekonomian, upaya memenuhi *Mandatory spending* yang diberikan pemerintah pusat harus dikurangi, dan upaya menciptakan tempat-tempat yang dapat menjadi sumber pendapatan dari sektor pajak atau retribusi dan melakukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi yaitu di lembaga Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Tarakan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan beserta jajarannya dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Tarakan yang merupakan senior penulis yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat*, Jakarta.

..... 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Irma Yuliani. 2019. *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

..... 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

....., 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang *Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan*.

Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tarakan*.

Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 81 Tahun 2020 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tarakan*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

<https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/>. Erlich.(2020). COVID-19 (Novel Coronavirus). (n.d.). Senin, 11 Mei 2020.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public/>. WHO.(2020). Pertanyaan Jawaban Terkait COVID-19 untuk Publik. Selasa, 28 April 2020.

Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Allo Layuk, P. K., (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(3), 217593.

Purnamasari, D., & Rodiyah, I., 2019. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010–2014. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), 75-92.

Tolosang, K. D., 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3).